



ANALISIS EFEKTIVITAS KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN STUNTING DI WILAYAH PERDESAAN (STUDI TERAPAN DI KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG)

Sri Dinarwati¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Sridinarwati94@gmail.com

Yoga Mahesya Nurfadilah²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

yogamahesya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di wilayah perdesaan, dengan studi kasus di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara UPTD P5A, puskesmas, pemerintah desa, dan kader posyandu belum optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya sistem koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat sasaran. Berdasarkan temuan ini, disarankan adanya forum koordinasi rutin lintas sektor, penguatan kapasitas kader dan pelaksana desa, serta integrasi anggaran stunting ke dalam perencanaan Dana Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola kolaboratif dalam pelayanan kesehatan masyarakat perdesaan.

Kata kunci: Kolaborasi lintas sektor, stunting, implementasi kebijakan, perdesaan, UPTD P5A

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of cross-sectoral collaboration in implementing the accelerated stunting reduction program in rural areas, with a case study in Blanakan Subdistrict, Subang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the collaboration among UPTD P5A, community health centers (puskesmas), village governments, and posyandu cadres has not been optimal. The main obstacles lie in weak coordination systems, limited resources, and low active participation from the target communities. Based on these findings, it is recommended to establish regular cross-sectoral coordination forums, strengthen the capacity of village implementers and cadres, and integrate stunting-related budgeting into Village



Fund planning. This study provides practical contributions to strengthening collaborative governance in rural public health services.

Keywords: *Cross-sectoral collaboration, stunting, policy implementation, rural areas, UPTD P5A*

Pendahuluan

Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 melalui berbagai intervensi terintegrasi yang melibatkan banyak sektor. Namun demikian, pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada program formal pemerintah semata, tetapi juga pada sejauh mana kolaborasi lintas sektor – termasuk dinas kesehatan, pemerintah desa, kader posyandu, hingga sektor swasta – dapat terjalin dan berjalan efektif, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki tantangan geografis, ekonomi, dan sosial tersendiri.

Kolaborasi lintas sektor menjadi pendekatan strategis dalam menanggulangi stunting karena sifatnya yang multidimensi. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi spesifik dan sensitif, edukasi kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, serta penguatan akses terhadap layanan dasar. Seluruh elemen tersebut berada di bawah tanggung jawab berbagai unit dan organisasi yang berbeda. Oleh karena itu, tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang kuat antar aktor pelaksana, pelaksanaan program rawan menghadapi hambatan teknis maupun administratif.

Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, merupakan contoh wilayah perdesaan yang secara administratif telah menerapkan berbagai program penanganan stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dalam periode 2021 hingga 2023, terdapat fluktuasi dan peningkatan kasus stunting, terutama di wilayah Puskesmas Blanakan yang menunjukkan lonjakan signifikan. Fenomena ini menandakan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan kolaboratif antar unit pelaksana kebijakan, baik dari segi distribusi intervensi, komunikasi antar lembaga, maupun partisipasi masyarakat.

Beberapa studi terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan atau efektivitas program secara internal. Namun, masih jarang kajian yang menelaah bagaimana bentuk, pola, dan kendala kolaborasi lintas sektor dalam praktik nyata, khususnya di tingkat kecamatan dan desa. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian terapan, kajian ini menjadi penting untuk memberikan masukan yang aplikatif dan berbasis konteks lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di wilayah Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Fokus diarahkan pada sejauh mana koordinasi antar aktor (pemerintah daerah, UPTD P5A, puskesmas, pemerintah desa, kader posyandu, serta sektor pendukung lain) dapat menciptakan intervensi yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan diterima oleh masyarakat sasaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan strategi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan perdesaan.



Kerangka Teori

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Kebijakan Publik

Kolaborasi lintas sektor dalam konteks kebijakan publik didefinisikan sebagai kerja sama antar berbagai aktor – baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah – yang memiliki tujuan dan kontribusi berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai hasil kebijakan yang lebih efektif (Ansell & Gash, 2008). Dalam isu stunting, kolaborasi lintas sektor mencakup sinergi antara dinas kesehatan, dinas sosial, pemerintah desa, UPTD, puskesmas, kader posyandu, bahkan hingga lembaga keagamaan atau komunitas lokal.

Kolaborasi yang efektif dicirikan oleh adanya tujuan bersama (*shared goals*), saling ketergantungan sumber daya (*resource interdependence*), dan mekanisme komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena masing-masing aktor memegang fungsi yang saling melengkapi. Misalnya, pemerintah desa memegang kekuasaan dalam penganggaran, sementara kader posyandu memegang kedekatan sosial dengan masyarakat sasaran.

Teori Implementasi Kebijakan: Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Disposisi atau Sikap Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait
6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Model ini menekankan bahwa interaksi antar elemen tersebut sangat menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan. Dalam konteks kolaborasi lintas sektor, fokus utama adalah pada komunikasi antar organisasi, sumber daya, dan sikap pelaksana, yang menjadi penggerak utama sinergi antar lembaga.

Teori Governansi Kolaboratif (Collaborative Governance)

Teori ini diperkenalkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan pentingnya proses bersama (*shared process*) dalam tata kelola publik. Tata kelola kolaboratif mengedepankan integrasi antara aktor formal dan informal yang berpartisipasi dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, proses penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor non-pemerintah.

Elemen penting dalam *collaborative governance* antara lain:

1. Kepemimpinan bersama (*shared leadership*)
2. Kapabilitas institusional dan sosial
3. Kepercayaan antar aktor
4. Komitmen terhadap hasil kolektif



Jika salah satu elemen ini lemah, kolaborasi yang terjadi menjadi bersifat seremonial, tidak fungsional, dan kehilangan efektivitasnya.

Pembangunan Kesehatan Berbasis Komunitas

Penanganan stunting merupakan bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat. Menurut WHO (2008), pendekatan berbasis komunitas (community-based approach) sangat penting untuk intervensi yang berkelanjutan, terutama di wilayah perdesaan. Keterlibatan masyarakat lokal seperti kader posyandu, tokoh masyarakat, dan keluarga sasaran menjadi ujung tombak keberhasilan program. Tanpa dukungan sosial yang kuat di tingkat komunitas, kebijakan teknis seringkali tidak berjalan efektif di lapangan.

Relevansi Kajian Teori dengan Fokus Penelitian

Berdasarkan teori-teori di atas, maka pendekatan kolaboratif menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan program penanganan stunting di wilayah perdesaan. Model Van Meter dan Van Horn akan digunakan sebagai kerangka dasar untuk menganalisis indikator keberhasilan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Blanakan, yang akan dipadukan dengan prinsip *collaborative governance* sebagai kerangka kontekstual dalam menjelaskan dinamika lintas aktor dan lintas sektor.

Metodologi Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan jenis **penelitian terapan**. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program penanganan stunting di wilayah perdesaan, khususnya di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Kecamatan Blanakan, yang mencakup beberapa desa seperti Blanakan, Cilamayagirang, dan Cilamayahilir.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kolaborasi Program Stunting di Kecamatan Blanakan

Kecamatan Blanakan merupakan salah satu wilayah perdesaan di Kabupaten Subang yang memiliki tingkat kerentanan stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, kasus stunting di Puskesmas Blanakan meningkat dari 2 jiwa (2021) menjadi 20 jiwa (2023), sedangkan di Puskesmas Cilamayagirang naik dari 4 jiwa menjadi 5 jiwa pada periode yang sama.

Berbagai program telah dijalankan oleh UPTD P5A Kecamatan Blanakan bersama puskesmas, pemerintah desa, dan kader posyandu, seperti:

1. Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil,



2. Distribusi tablet tambah darah,
3. Edukasi gizi untuk remaja dan calon pengantin,
4. Pendataan keluarga risiko stunting (KRS).

Namun, efektivitas pelaksanaan program ini sangat bergantung pada bagaimana kerja sama lintas sektor dijalankan. Penelitian ini mengkaji kolaborasi tersebut menggunakan kerangka Van Meter dan Van Horn, khususnya pada aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial dan politik.

Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah tidak adanya sistem komunikasi terstruktur dan berkelanjutan antar aktor pelaksana. Forum koordinasi lintas sektor hanya dilakukan pada saat program tahunan, tidak secara rutin dalam operasional bulanan.

Contohnya, pihak Puskesmas sering tidak mendapatkan update terbaru dari kader posyandu mengenai perkembangan balita stunting di desa, dan sebaliknya, kader tidak selalu memperoleh arahan teknis yang jelas dari puskesmas atau UPTD. Kurangnya sinkronisasi ini membuat intervensi yang diberikan seringkali tidak tepat sasaran atau tertunda.

Hal ini menandakan pentingnya mekanisme komunikasi dua arah yang jelas dan rutin, termasuk penggunaan teknologi sederhana seperti grup koordinasi WhatsApp atau dashboard monitoring bersama untuk pelaporan real-time.

Sumber Daya: Dana, SDM, dan Sarana Pendukung

Penanganan stunting membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi dana, tenaga pelaksana, maupun fasilitas. Di lapangan ditemukan bahwa:

1. Dana dari pemerintah desa untuk program stunting tidak dialokasikan secara merata. Hanya beberapa desa yang mengalokasikan PMT dari Dana Desa, sisanya bergantung pada bantuan dari kabupaten atau provinsi.
2. Distribusi makanan tambahan dan tablet tambah darah tidak dilakukan secara kontinyu. Bantuan PMT hanya diberikan 2-3 bulan sekali, tidak sesuai dengan standar 90 hari berturut-turut seperti yang direkomendasikan.
3. Kader posyandu aktif, namun tidak semua dibekali pelatihan berkelanjutan atau insentif yang layak. Hal ini menurunkan semangat dan akurasi pelaporan di lapangan.

Masalah keterbatasan sumber daya ini memperlihatkan pentingnya komitmen pemerintah desa dan lintas sektor untuk menyelaraskan rencana kerja dan pembiayaan secara kolaboratif, bukan hanya berdasarkan tugas sektoral masing-masing.

Disposisi Pelaksana dan Partisipasi Masyarakat

Sikap para pelaksana (kader, bidan, perangkat desa) terhadap program ini secara umum positif. Mereka menyadari pentingnya pencegahan stunting dan bersedia bekerja sama. Namun, keterbatasan waktu dan insentif kadang membuat keterlibatan mereka tidak optimal. Di sisi masyarakat, ditemukan dua hal menarik:



1. Sebagian Masyarakat dengan ekonomi menengah menolak bantuan, karena merasa "tidak berhak" atau khawatir distigma miskin. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan edukasi tentang basis intervensi yang bersifat kesehatan, bukan status sosial.
2. Keluarga dengan risiko stunting tidak semua hadir dalam penyuluhan atau memanfaatkan layanan yang ada, menunjukkan bahwa perubahan perilaku masih menjadi tantangan.

Artinya, di balik koordinasi teknis, kolaborasi lintas sektor juga perlu menyentuh aspek pendekatan sosial dan komunikasi interpersonal yang efektif di tingkat komunitas.

Kondisi Sosial dan Dukungan Regulasi

Regulasi sebenarnya sudah cukup kuat. Pemerintah Kabupaten Subang telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019, bahkan dukungan dari Provinsi Jawa Barat juga ada. Namun, pemahaman di tingkat pelaksana – terutama perangkat desa – masih terbatas. Beberapa kepala desa mengaku belum menjadikan program stunting sebagai prioritas dalam Musrenbangdes.

Dari sisi sosial-ekonomi, tantangan terbesar adalah keterbatasan akses pangan bergizi dan layanan kesehatan di daerah pesisir yang jauh dari pusat puskesmas. Kolaborasi sektor swasta atau CSR juga belum aktif mendukung wilayah ini, padahal bisa menjadi mitra penting.

Analisis Teoritis: Kenapa Kolaborasi Belum Optimal

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, kegagalan koordinasi dan komunikasi yang intens serta ketidakterpaduan sumber daya menyebabkan efektivitas implementasi menurun. Selain itu, teori *collaborative governance* juga menekankan pentingnya kepemimpinan bersama (shared leadership) dan trust antar aktor, yang belum sepenuhnya terbentuk di Kecamatan Blanakan.

Kolaborasi saat ini masih bersifat administratif – misalnya hanya sebatas pelaporan atau pembagian tugas teknis – belum menyentuh tahap perencanaan strategis bersama dan komitmen lintas anggaran.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Blanakan masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terbentuk jejaring antar UPTD P5A, puskesmas, pemerintah desa, dan kader posyandu, pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi rutin, ketimpangan distribusi sumber daya, serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat sasaran.

Beberapa temuan penting meliputi:

1. Komunikasi antar aktor bersifat sporadis dan belum berbasis sistem koordinasi yang terstruktur.
2. Sumber daya baik dalam bentuk dana, logistik, maupun pelatihan SDM masih belum memadai dan merata di setiap desa.



3. Sikap pelaksana seperti kader posyandu cukup antusias, namun belum didukung insentif dan pelatihan yang berkelanjutan.
4. Partisipasi masyarakat rendah karena kurangnya pemahaman dan pendekatan sosial yang bersifat edukatif.
5. Lingkungan sosial ekonomi keluarga miskin dan jarak terhadap fasilitas kesehatan menjadi penghambat intervensi program secara menyeluruh.

Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaan di lapangan, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn serta konsep *collaborative governance*.

Referensi

- Ansell, C. & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Zainal, M., & Kamal, M. (2020). *Gizi dan Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting*. Peraturan Bupati Subang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. (2023). *Data Prevalensi Stunting Kecamatan Blanakan*.